

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama. Bandung.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anshori Abdul Ghofur ,2009, “*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*”,UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* , Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gadjong, Agussalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta,
- H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isa Arif, M. 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Koesoemawati,Ira dan Yunirman Rizan, 2009 “ *Ke Notaris* ” Raih Asa Sukses , Jakarta,.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Moeljanto, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta
- Otto, Jan Michael, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta
- Purnomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2014, *Pelanggaran Hukum oleh Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
- Putri A.R., 2001 “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*”, Sofmedia, Jakarta
- Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salman, Otje dan, Anton FSusanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta.
- Soegondo Raden Notodisoerjo, 1993, “*Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*”, cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soesilo, R, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491

C. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online diakses tgl 30 april 2017 jam 9.00.

D. KARYA ILMIAH

Poerwandani, Khristi Ida Afriana, “Analisa Yuridis Penandatanganan Akta Notaris yang Tidak Dilakukan Bersamaan Oleh Para Pihak Dihadapan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

Surmaniningsih ,Endang, “Bentuk Penyimpangan Mekanisme Pembuatan dan Penandatanganan Akta PPAT”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.

Usman, “Analisis Hukum Penyimpangan Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris”, *Tesis*, program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Yuslim, “*Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.